

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kadir, 2005 "*Pengenalan Sistem Informasi*", Yogyakarta : Andi Publisher
- Ladjamudin, 2005 "*Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Jogiyanto, 2005 "*Sistem Teknologi Informasi*", Yogyakarta : Andi Offset
- Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, 2010 "*Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance.*" (Yogyakarta : Graha Ilmu),.
- Janet Caldw, 2001 "*Intitute for Electronic Government*" (UK : IBM Corporation,).
- Bambang Istianto, 2011 "*Manajemen Pemerintahan : dalam Perspektif Pelayanan Publik*" Edisi 2, (Jakarta : Mitra Wacana Media),.
- John W. Creswell, 2013 "*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Emzie. 2014. "*Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*". Jakarta : Rajawali Pers.
- Richardus Eko Indrajit, 2002 "*Electronic government : strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*" Yogyakarta : Andi, 2002

Jurnal :

- Gunawan dan Wuyono, 2007 "*Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*" MTI-UI Vol. 3 No. 1

https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8630&keywors=diakses pada 8 april 2023.

Mesnan Silalahi, Darmawan Napitupulu, Gulda Patria "*Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia*" ISSN 2356-4865 Vol. 1 No. 1 Jakarta Timur.

<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/08/article/view/31> diakses pada 20 februari 2023.

Suryadharma, Tony Dwi Susanto "*Faktor Penerimaan Media Sosial Instansi Pemerintah di Indonesia*" INTEGER: Journal of Information Technology, Vol 2, No 2, September 2017 <http://ejurnal.itats.ac.id/integer/issue/view/12/showToc> diakses pada 9 maret 2023.

Jeffrey Roy "E-Government" 2003 Yordan Putra Anggana, A. Yuli Andi Gani, Sarwono "*UPAYA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MALANG*" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.1, Hal.80-88 <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/746> Diakses pada tanggal 4 April 2023.

Hukeria Harianja (2020), "*Analisis Kebijakan Publik Dalam Penerapan E-Government Binjai SmartCity*", e-ISSN 2775-4049, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1157> diakses pada 12 juni 2023

Ida Syafriyani (2018), "*Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumenep*"Vol 3 No 1.

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4131> diakses pada 12 juni 2023

Yunita Hanysayh MUSAAD (2020), “Analisis Penerapan Kebijakan E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Merauke”, Vol 1 No 7
<https://www.neliti.com/id/publications/330037/analisis-penerapan-kebijakan-e-government-di-dinas-komunikasi-dan-informatika-ka> diakses pada 12 Juni 2023

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003.

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan bahwa Daftar Rancangan Undang-Undang.

Website :

<http://sipkumhamai.balitbangham.go.id/>.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

NO	DIMENSI	INDIKATOR	KEPALA PUSDATIN BALITBANGKUMHAM	STAF PEGAWAI PENGELOLA SIPKUMHAM	STAF PEGAWAI ANALISIS KEBIJAKAN SIPKUMHAM	MASYARAKAT PENGGUNA APLIKASI SIPKUMHAM
1	Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut Bapak/Ibu dalam penerapan dan pelaksanaan program SIPKUMHAM apakah sangat mendukung dengan adanya database permasalahan hukum dan HAM berbasis E-Government?	Menurut Bapak/Ibu dalam penerapan dan pelaksanaan program SIPKUMHAM apakah sangat mendukung dengan adanya database permasalahan hukum dan HAM berbasis E-Government?	Menurut Bapak/Ibu apakah aplikasi SIPKUMHAM dapat mendukung konsep proses pengambilan kebijakan?	Menurut saudara, apakah program SIPKUMHAM dapat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik?
		Disosialisasinya Kerangka E-Government	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat untuk mendukung pengetahuan terhadap program SIPKUMHAM ?	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat untuk mendukung pengetahuan terhadap pengelola	Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat dari hasil/outputs suatu kebijakan yang sudah dibuat?	Menurut saudara, apakah sosialisasi yang diberikan terhadap pengetahuan program SIPKUMHAM dapat mudah dimengerti

				n program SIPKUMHAM ?		dan dipahami?
2	Capacity (Kapasitas)	Ketersediaan Sumber Daya Financial	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif E-Government?	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial dalam pengelolaan SIPKUMHAM?	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial dalam menganalisa suatu kebijakan?	Menurut saudara apakah dipungut biaya ketika melaporkan permasalahan melalui program SIPKUMHAM ?
		Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terkait program SIPKUMHAM?	Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala atas ketersediaan infrastruktur dalam pengelolaan aplikasi SIPKUMHAM ?	Menurut Bapak/Ibu apakah data-data yang tersimpan dalam database dapat dengan mudah diolah kembali untuk proses membuat kebijakan?	Menurut saudara apakah dapat mudah mengakses dalam pelaporan pada program SIPKUMHAM?
		Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pada program SIPKUMHAM?	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan	Menurut saudara, apakah aplikasi SIPKUMHAM dapat memberikan data dan informasi berita yang

				keahlian pada program SIPKUM HAM?	keahlian pada program SIPKUM HAM?	akurat dan jelas?
3	Value (Manfaat)	1	Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan aplikasi SIPKUMHAM telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?	Menurut Bapak/Ibu dalam pengoperasian sistem pada aktivitas sehari-hari, apakah sistem dapat menghasilkan outputs yang sesuai dengan waktu yang tepat?	Menurut Bapak/Ibu manfaat dalam outputs analisa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat?	Menurut saudara, apakah keberadaan aplikasi SIPKUMHAM dapat mengatasi permasalahan yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut ?



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Narasumber 1

Nama : Ibu Yani

Jabatan : Koordinator Publikasi Pengembangan SIPKUMHAM

Waktu : 12 Juli 2023

Tempat : Pusdatin BalitbangKumHam

DIMENSI	INDIKATOR	Pertanyaan	Jawaban
Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut Bapak/Ibu dalam penerapan dan pelaksanaan program SIPKUMHAM apakah sangat mendukung dengan adanya database permasalahan hukum dan HAM berbasis E-Government?	Menurut saya adanya program ini sangat mendukung ya karena SIPKUMHAM ini adalah alat bantu penyediaan sumber bukti berita dari media online yang di inventarisir dengan kategori Hukum, dan HAM program ini dibuat sebagai bahan ajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai langkah strategis <i>Transfer Knowledge</i> SIPKUMHAM kepada pembelajar yang ada di BPSDM guna memahami dan mengenalkan program SIPKUMHAM dalam membuat kebijakan berbasis bukti. Konsep pembuatan kebijakan berbasis bukti pemanfaatan teknologi informasi di dalam penyusunan kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat dilakukan dengan mengambil kumpulan data yang tersedia di database

			<p>SIPKUMHAM. Database tersebut di bangun dengan mengambil data dari media <i>online</i> (berita) dan media sosial (<i>twitter</i>) yang telah terdaftar di Dewan Pers dan akun official yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebut diharapkan mampu memberikan data yang relevan, valid, dan representatif sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan berbasis bukti (<i>Evidence Based Policy</i>) dan pengambilan keputusan pimpinan organisasi yang pada akhirnya pilihan kebijakan yang diambil diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi masyarakat.</p>
	<p>Disosialisasikan ya Kerangka E-Government</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat untuk mendukung pengetahuan terhadap program SIPKUMHAM ?</p>	<p>Menurut saya untuk sosialisasi memang sudah dilakukan akan tetapi yang kami lakukan sosialisasi itu dengan datang langsung hanya di berbagai Kanwil seluruh Indonesia atau melalui zoom meeting untuk pengenalan SIPKUMHAM, memang kita menyebar luaskan adanya program ini di berbagai media, diberbagai spanduk dan kami membuat modul juga tata cara mengakses SIPKUMHAM ini, akan tetapi kita belum melakukan sosialisasi ke masyarakat, maka dari itu bisa dikatakan kurang partisipasi masyarakat dan masyarakat sebenarnya bisa mengakses program ini dengan mudah, ya yang</p>

			<p>tadi saya bilang sangat disayangkan partisipasi masyarakatnya masih sedikit dan insyaallah kami akan sosialisasikan dan meningkatkan program ini agar masyarakat lebih tau, jika masyarakat cari tau tentang program ini sangat mudah dipahami dan sangat mudah digunakan program ini dan masyarakat juga bisa merasakan informasi berita-berita permasalahan hukum dan HAM yang terjadi di seluruh Indonesia</p>
<p>Capacity (Kapasitas)</p>	<p>Ketersediaan Sumber Daya Financial</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif E-Government?</p>	<p>Terwujudnya pelaksanaan Program dan Pelaporan yang terintegrasi, akuntabel, transparan, tepat sasaran dan tepat waktu. Tersusunnya kebutuhan alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien, meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan untuk lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas serta tersusunnya RKA Kebutuhan anggaran dan data dukung yang diperlukan sebagai patokan dalam Analisis Kebutuhan Anggaran TA berjalan. Menurut saya sejauh ini untuk jumlah dana yang tersedia untuk merealisasikan program ini yaaaah cukup memadai. Maksudnya cukup memadai di sini yaa kan gak semua dana yang di berikan kepada kami kami gunakan untuk membangun E-Government saja kan, ada</p>

			<p>program-program lain juga yang kami perhatikan. Jadi mengapa kami bilang cukup karena memang kami merencanakan program ini bertahap, tidak semerta-merta harus terwujud 100% untuk tahun 2023 ini tapi bertahap karena kan sebelum kita membuat program ini dan berjalannya program ini sudah kami perhitungkan dengan matang sehingga agar berjalan dengan baik ya pasti kita butuh revisi anggaran karena kan semakin berjalannya tahun program ini pasti ada pengembangannya yang membutuhkan dana rincian yang terbaru</p>
	<p>Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terkait program SIPKUMHAM?</p>	<p>Infrastruktur teknologi informasi itu kan berfungsi untuk menyediakan platform untuk mendukung semua system informasi dalam bisnis perangkat keras dan perangkat lunak. Mengapa infrastruktur teknologi informasi menyediakan platform yang sesuai untuk semua aplikasi karena infrastruktur IT menyediakan lingkungan yang aman, dapat diandalkan, mudah diintegrasikan, mudah dipelihara dan efisien. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau ketersediaan aplikasi dan keamanan data. Menurut saya untuk saat ini sudah cukup terkait ketersediaan infrastruktur teknologi</p>

			informasi disini yah entah itu dari <i>hardware</i> dan <i>software</i>
	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pada program SIPKUMHAM?	Untuk SDM terkait keahlian pada program SIPKUMHAM kita itu masih minim untuk menunjang program SIPKUMHAM, walaupun SDM kita minim atau tidak terpenuhi kami bersedia memanggil narasumber atau ahli dari luar agar memenuhi SDM kita
Value (Manfaat)	1	Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan aplikasi SIPKUMHAM telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai?	ya menurut saya sih manfaat dari program SIPKUMHAM ini telah sesuai dengan tujuan yang dicapai karena kan pada dasarnya dengan adanya program ini, setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan bukti atau data dukung masalah yang ada dan setiap masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani secara maksimal melalui kegiatan ataupun rekomendasi kebijakan jadi program ini hanya sebuah penampungan berita permasalahan-permasalahan hukum dan HAM yang ada di indonesia yaa agar peneliti mempermudah membuat rekomendasi sebuah kebijakan pada satuan kerja lainnya

B. Narasumber 2

Nama : Bapak Adi

Jabatan : Staff Pengelola Program SIPKUMHAM

Waktu : 26 Juni 2023

Tempat : Pusdatin BalitbangKumHam

DIMENSI	INDIKATOR	Pertanyaan	Jawaban
Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut Bapak/Ibu dalam penerapan dan pelaksanaan program SIPKUMHAM apakah sangat mendukung dengan adanya database permasalahan hukum dan HAM berbasis E-Government?	sipkumham itu kan sebenarnya databasenya berbasis AI <i>Artificial Intelligence</i> , sebetulnya yang di <i>Artificial Intelligence</i> ini itu dia pengumpulan datanya kalau ditanya mendukung atau engganya ya sangat membantu soalnya kan disini awalnya itu kita basenya itu kan penelitian dimana untuk mengajukan suatu hasil penelitian itu kebanyakan itu masih bersifat permintaan dari instasni lain , nah kalau base sipkumham ini kita melihat data dilapangan maksudnya berjanji permasalahan yang ada di indonesia nasional ini apa gitu, nah permintannya itu dari sipkumham nanti dikaji kemudian diberikan suatu analisis nnti hasil rekomendasi itu disampaikan ke unit yang bersangkutan. Kemudian base on sipkumham itu adalah memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Nah kalau kita lihat tiap hari misalkan diberita online seperti tv

			<p>atau media cetak itu susah ya, sipkumham itu mempermudah untuk mengetahui apa sih yang muncul permasalahan di masyarakat hari ini apa, yang tertinggi itu masalah apa kemudian kami analisis setelah ada tema yang dihasilkan kami melakukan analisis itu dibalitbang, awalnya belum ada sipkumham kami itu meneliti disuruh eksplere melihat pemberitaan itu dilihat dari tv, koran apa sih yang menjadi haitline hari ini, kalau memang ada permasalahan baru bisa diangkat suatu kajian atau penelitian.</p>
	<p>Disosialisasikan ya Kerangka E-Government</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat untuk mendukung pengetahuan terhadap pengelolaan program SIPKUMHAM ?</p>	<p>kalau pengelolaan terkait sosialisasi sebetulnya kalau dilihat kondisi ini kan membantu para analis kebijakan maupun peneliti, untuk analis kebijakan itu memetakan masalah yang ada di awal corenya itu sebenarnya di internal tapi ada juga data yang memang kita open publik misalkan data permasalahan hukum dengan nasional daerah maupun yang terjadi di wilayah . kalau terkait sosialisasi ke masyarakat kami disini untuk ke publiknya sih belum ada tapi untuk memasang banner di website kemudian akses ke masyarakat misalkna meregistrasi, dulu itu mengakses sipkumham itu ga di open untuk masyarakt, nah sekarang kita membuka untuk</p>

			<p>masyarakat mendaftarkan sendiri dan yang hanya bisa dilakukannya hanya pelaksanaan hukum dan HAM, kalau pelayanan publik itu hanya di internal kemenkumham hanya saja kami membuat modul tata cara penggunaan sipkumham agar masyarakat bisa mengakses</p>
<p>Capacity (Kapasitas)</p>	<p>Ketersediaan Sumber Daya Financial</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial dalam pengelolaan SIPKUMHAM?</p>	<p>kalau financial sih ya dari awalnya pun kan juga dari donor organisasi NJO yang dananya itu berasal dari pemungutan pajak kewarganegaraan amerika kemudian kerjasama sama balitbang kemudian terciptalah sipkumham, nah sekarang ini karena memang pengembangannya membutuhkan dana ya terutama yang saat ini dipakai APBN, APBN ini kan terbatas nah kemudian fitur-fitur yang kami update pun juga minim maksudnya yang hanya bisa tercover pada tahun tahun berjalan, untuk progres sipkumham kedepannya sebenarnya memang kita memetakan selalu baik kedepannya kami juga memiliki planning untuk pengembangan sipkumham tersebut. cuman karena APBN itu kan memang porsinya dibatasi ya jadi ya financialnya itu memang masih kurang</p>

	<p>Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala atas ketersediaan infrastruktur dalam pengelolaan aplikasi SIPKUMHAM ?</p>	<p>infrastruktur untuk database dan perangkat-perangkatnya sih engga ya karena kita semua kan di alokasikan oleh pusdatin jadi untuk infrastruktur tidak ada masalah cuman mungkin ya ketika memang alokasi kita membutuhkan space yang banyak dan tinggi, dan ruangannya yang banyak pun terbagi dengan satuan lain. karena sipkumham ini corenya belum banyak jadi dirasa belum membutuhkan research yang banyak. tapi kan kedepannya ini kan database makin bertambah nah itu mungkin kalau ada perlu perhatian sendiri dari gedung tengah kalau aplikasi ini perlu research lebih banyak lagi. tapi selama ini masih aman</p>
	<p>Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pada program SIPKUMHAM?</p>	<p>kalau untuk sumber daya manusia sendiri kita kan ngomonginnya kompetensi ya itu masih minim, minimnya itu dalam hal perhatian teknologi yang baru misalkan sipkumham ini basenya AI, AI sendiri itu untuk pelatihan sendiri ini masih jarang maksudnya pelatihan untuk kami ini dalam pembelajaran AI masih minim, kemudian dari jumlah sumber daya manusia disini dan kualitas juga masih minim kami disini kerjanya masih membagi bagi tugas itupun kadang juga tidak terpegang</p>

<p>Value (Manfaat)</p>	<p>1</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu dalam pengoperasian sistem pada aktivitas sehari-hari, apakah sistem dapat menghasilkan outputs yang sesuai dengan waktu yang tepat?</p>	<p>kalau secara sesuai kita tidak bisa memastikan, karena ini adalah sistem dan mesin ya masih banyak kekurangan seperti data yang belum akurat itu ada tapi kita usahakan namanya sistem itu bisa kita minimalisir dengan adanya validasi yang pertama tadi terkait akurasi dan validasi itu masih terbentur di pertama pengembangannya dan kemudian itu anggaran dan kompetensi pemangkunya dan ketiga itu dari jumlah monitoring kalau secara realtimenya untuk pengambilan datanya sudah realtime hanya saja karena datanya kurang akurat ketika nanti kita mau ada perbaikan data itu kan nanti kita reload lagi nah itu ada keterlambtaan dalam pengambilan data</p>
-------------------------------	-----------------	---	--



C. Narasumber 3

Nama : Kak Chintia
 Jabatan : Staff Analis Kebijakan SIPKUMHAM
 Waktu : 19 Juni 2023
 Tempat : Pusdatin BalitbangKumHam

DIMENSI	INDIKATOR	Pertanyaan	Jawaban
Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut Bapak/Ibu apakah aplikasi SIPKUMHAM dapat mendukung konsep pengambilan kebijakan?	<p>kalau untuk saat ini karena sipkumham kan sudah ada dari 2020 dan sudah berkembang jalan 3 tahunan yang mana memang tujuannya sipkumham ini ada karena untuk memberikan informasi terkait permasalahan pelayanan publik dibidang hukum dan HAM kemudian permasalahan hukum dan permasalahan ham sejauh ini yang sudah kami lakukan dengan pemanfaatan sipkumham ada beberapa isu memang yang sudah mempengaruhi beberapa kajian yang kami lakukan di tahun 2022, awalnya 2021 ada pemberitaan terkait banyaknya kasus bunuh diri dilapas , nah itu terjaring memang tidak banyak beritanya di sipkumham tapi ada beberapa satu atau dua berita seperti itu yang menampilkan isu tentang banyaknya kasusu bunuh diri di lapas dan rutan sehingga pada saat itu kami lakukan kajian kecil terkait</p>

			<p>apa yang menyebabkan sebenarnya kejadian kematian yang dilapas dan ternyata memang salah satunya itu bunuh diri, dan ditahun berjalan itu dilakukan kajian kecil dan ditahun berikutnya di tahun anggaran 2022 itu kita melakukan kajian mendalam terkait bagaimana sebetulnya layanan kesehatan mental yang ada di lapas-lapas karena kejaian bunuh diri itu kan berkaitan erat dengan bagaimana kesehatan mental dilapas itu sendiri, akhirnya kita melakukan kajian kebijakan secara mendalam terkait layanan kesehatan mental dan alhamdulillah salah satu kajian itu saat ini sudah ditindak lanjuti untuk proses pembuatan road map terkait layanan kesehatan menatl di seluruh lapas dan rutan yang ada di indonesia , nah itu sudah berjalan di tahun kemarin jadi sebetulnya beberapa isu yang kita angkat dari sipkumham itu sebetulnya bisa menjadi salah satu referensi kita khususnya di kementerian hukum dan HAM untuk melihat isu-isu yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk kajian dan berikan rekomendasi kebijakannya ke unit terkait.</p>
--	--	---	--

	<p>Disosialisasikan ya Kerangka E-Government</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi ke masyarakat dari hasil/outputs suatu kebijakan yang sudah dibuat?</p>	<p>untuk sosialisasinya di balitbang sendiri dan saat ini sudah berubah jadi BSK itu kita punya salah satu layanan namanya itu publikasi selain dari kita publish hasil kajian kita melalui website atau artikel kebijakan dan jurnal kita juga melakukan sosialisasinya melalui kegiatan Opini namanya kalau dulu itu Obrolan Peneliti, tapi karena peneliti sudah tidak ada jadinya Opini tetap dilakukan dengan konsep yang sama tapi diganti dengan Topik Obrolan Kebijakan nah disana kita bikin forum untuk menyampaikan hasil penelitian kita dan rekomendasi yang kita berikan dengan berbagai stakeholder termasuk dari akademisi juga kemudian stakeholder terkait unit kerja eselon I yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang sedang kita bahas di forum tersebut dan juga akademisi dan masyarakat, di forum ini kita mengundang sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat yang bisa join dan ini terbuka untuk umum jadi gak hanya mahasiswa, pegawai kemenkumham saja tapi terbuka untuk umum selayaknya webinar, karena kita kemarin kita pandemi terus kita memanfaatkan manajemen dan sebagainya ternyata</p>
--	---	--	---

			partisipannya bisa lebih luas lagi yang kita lakukan.
Capacity (Kapasitas)	Ketersediaan Sumber Daya Financial	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya financial dalam menganalisa suatu kebijakan ?	kalaupun dari sisi anggaran cukup yah karena memang kita melakukan kebijakan dan postur anggarannya sudah ditentukan juga oleh bagian keuangan dan lain sebagainya dan untuk sejauh ini postur anggaran dalam setiap kegiatan kajian baik kajian yang utama ataupun kajian aktual itu sudah cukup semuanya terakomodir
	Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Menurut Bapak/Ibu apakah data-data yang tersimpan dalam database dapat dengan mudah diolah kembali untuk proses membuat kebijakan?	sebetulnya data sipkumham ini kalau dibidang masih sangat bahan dasar untuk pengolahannya memang membutuhkan analisis yang lebih dalam kemudian visualisasi datanya juga butuh diolah kembali jadi memang ibaratnya sipkumham ini datanya memang masih dibagian dasarnya gitu jadi mengolahnya butuh waktu butuh analisis yang mendalam, sejauh ini karena memang masih menunjukkan kaya topik-topiknya permasalahannya terus aktor yang ada dan lain sebagainya itu yang ada di sipkumham tapi memang ga bisa berdiri sendiri jadi data yang ada di sipkumham tidak bisa berdiri sendiri dan diolah dengan data pendukung

			lainnya baik dari artikel jurnal ataupun dari data data dari sumber lainnya.
	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian	Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pada program SIPKUMHAM?	kalau dari sisi sumber daya manusia tim pengkaji sejauh ini kita sudah punya analis kebijakan itu 7 orang yaitu ada analis hukum 1 orang dan analis kebijakan 6 orang. dan sejauh ini memang dari sisi substansi kebijakan kemudian substansi hukum dan HAM itu sudah cukup yah tapi sumber daya manusia kaya statistik kemudian data science itu memang tidak ada karena dikita juga belum ada jabatannya itu sehingga memang dari sistem pengolahan data dan lain-lain kita biasanya manggil narasumber dari luar itu jadi sebetulnya sumber daya manusia yang tidak terpenuhi yang ada dilingkup puslodayatun biasanya kita panggil sebagai narasumber dan itu sejauh ini masih terakomodir juga dan masih berjalan seiringan dan masih bisa menutupi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia yang ada di kita

<p>Value (Manfaat)</p>	<p>1</p>	<p>Menurut Bapak/Ibu manfaat dalam outputs analisa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat?</p>	<p>kalau diterima tergantung yah diterima atau tidaknya karena memang di topik sipkumham yang kita angkat memang ada yang kita lanjutkan ke kajian besar kaya seperti yang aku sebutin tadi kajian yang lebih mendalam tapi ada juga yang kajian kajian yang memang sifatnya hanya untuk internal kita dan bukan untuk kebijakan yang secara nasional ataupun lingkupnya yang lebih luas. jadi kebermanfaatannya beragam dari tergantung isu yang kita angkat tapi memang sejauh ini sipkumham masih butuh banyak pengembangan khususnya dibeberapa isu kaya isu hukum dan juga isu HAM, balik lagi tapi faktornya banyak gitu karena pemberitaan terkait HAM yang masih belum terlalu masif di masyarakat kemudian bagaimana sipkumham ini membaca bahwa itu permasalahan hukum atau permasalahan HAM yang memang perlu dikembangkan , nah kalau untuk ke aplikasinya sendiri kan karena memang saat ini masyarakat memang belum bisa akses meskipun bisa bikin akun sendiri di sipkumham tapi sejauh ini usernya masih kebanyakan dari intenal atau lingkungan kementerian hukum dan HAM sehingga masyarakat belum terlalu optimal dalam pemanfaatan</p>
-------------------------------	-----------------	--	--

			<p>sipkumham ini. Jadi user utama dari sipkumham ini adalah kanwil-kanwil dan UPT yang ada dilingkungan kementerian seluruh provinsi, tapi untuk masyarakat memang belum menjadi target utama untuk mengakses sipkumham ini. Tapi tahun depan akan ada pengembangan untuk bisa lebih mudah diakses untuk masyarakat</p>
--	--	--	---



D. Narasumber 4

Nama : Bapak Oki

Jabatan : Pengguna SIPKUMHAM Kanwil Jaksel

Waktu : 29 Juni 2023

Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan

DIMENSI	INDIKATOR	Pertanyaan	Jawaban
Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut saudara, apakah program SIPKUMHAM dapat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik?	<p>idealnya sih bisa, jika itu sipkumhamnya sudah optimal dalam hal pengoperasiannya karena masih banyak juga kelemahan-kelemahannya dari sipkumham itu, sehingga pada tahun ini kita evaluasi sipkumhamnya itu sendiri, sebetulnya sih tujuan awalnya adalah bagaimana sipkumham itu dapat menjangring informasi terkait dengan hukum, HAM dan pelayanan publik yang ada dilingkungan Kemenkumham untuk dijadikan suatu informasi dan data agar terjadinya perubahan misalnya ada terkait di tweet tentang imigrasi terkait antrian onlinenya bermasalah dari situ bisa dikaji dan dilakukan rekomendasi agar diambil tindakan perbaikan. Contoh untuk HAM misalnya terkait pelanggaran HAM di papua ketika itu dijadikan suatu pemberitaan bagaimana langkah-langkah yang bisa diperbuat oleh analis</p>

			kebijakan HAM misalnya sosialisasi di papua nah biasanya ada kajian terlebih dahulu. Jadi menurut saya sih sampai saat ini bisa dikategorikan aplikasi ini dapat mendukung dalam layanan publik.
	Disosialisasikan ya Kerangka E-Government	Menurut saudara, apakah sosialisasi yang diberikan terhadap pengetahuan program SIPKUMHAM dapat mudah dimengerti dan dipahami?	kita untuk sosialisai mempunyai modul, modulnya itu bagaimana cara penggunaan sipkumham tersebut, namun memang disini masih terbatas untuk username dan passwordnya masih orang-orang tertentu saja misalnya Kanwil berbagai provinsi atau UPT yang diberikan akses, memang harapannya kedepannya itu ini bisa digunakan untuk masyarakat luas dan masyarakat bisa mendalami dalam hal penggunaan aplikasi tersebut
Capacity (Kapasitas)	Ketersediaan Sumber Daya Financial	Menurut saudara apakah dipungut biaya ketika melaporkan permasalahan melalui program SIPKUMHAM?	untuk masalah akses aplikasi ini tidak sama sekali dipungut biaya, kita ini open akses kita juga tidak boleh memungut biaya apapun terhadap aplikasi ini
	Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Menurut saudara apakah dapat mudah mengakses dalam pelaporan pada program SIPKUMHAM?	sejauh ini kita sih untuk websitenya cepat ya tergantung saja jaringan di provinsi masing-masing yah, semua untuk tampilan dan aplikasi juga bisa dibuka semua terkait hukum dan ham dan pelayanan publik, memang tampilan agak berbeda ya pada yang memiliki akses seperti kanwil-kanwil atau UPT berbeda dengan

			tampilan punya masyarakat atau orang eksternal, untuk masyarakat punya keterbatasan dalam menggunakan aplikasi tersebut mungkin suatu saat sedang lemot itu pasti sedang perbaikan dalam aplikasi ini atau teman-teman kita yang mengakses atau membuka itu terlalu banyak
	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian	Menurut saudara, apakah aplikasi SIPKUMHAM dapat memberikan data dan informasi berita yang akurat dan jelas?	karena memang kita selektif dalam hal pemberitaan memang kita waktu diawal itu focus ke 150 media online yang sudah terverifikasi oleh dewan Pers artinya kita juga tidak mau ngambil media-media yang belum jelas. dari situ berarti juga sudah ada penyaringan untuk pemberitaan yang bermutu dan yang benar-benar jelas
Value (Manfaat)	1	Menurut saudara, apakah keberadaan aplikasi SIPKUMHAM dapat mengatasi permasalahan yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut ?	kita ini bukan penyelesaian masalah tetapi hanya supproting unit yang memberikan kajian untuk merekomendasikan dalam masalah-masalah tersebut ke Unit lainnya. yang artinya kan dari data-data yang kita tangkap dari sipkumham itu kemudian dikaji dengan mengundang narasumber stakeholder terkait dari situlah kita analisis dan rekomendasi kita memberikan unit teknis yang melaksanakan tugasnya dari permasalahan yang ada misalnya permasalahan di imigrasi, nah kita kasih dari hasil kajian dan dijadikan rekomendasi ke unit

			imigrasi untuk menyelaskan permasalahan. tapi selama ini dari unit teknis selalu menindak lanjuti permasalahan dari hasil kajian atau rekomendasi kita
--	--	--	---



E. Narasumber 5

Nama : Safira Salsabilla

Jabatan : Masyarakat

Waktu : 29 Juni 2023

Tempat : Di Lingkungan

DIMENSI	INDIKATOR	Pertanyaan	Jawaban
Support (Dukungan)	Disepakatinya Kerangka E-government	Menurut saudara, apakah program SIPKUMHAM dapat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik?	menurut saya cukup mendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik pada program ini karena adanya program ini kami tidak perlu repot melaporkan permasalahan secara datang langsung, adanya program ini mempermudah kami melaporkan permasalahan secara online
	Disosialisasikannya Kerangka E-Government	Menurut saudara, apakah sosialisasi yang diberikan terhadap pengetahuan program SIPKUMHAM dapat mudah dimengerti dan dipahami?	menurut saya sosialisasi yang diberikan terhadap pengetahuan program sipkumham ini mudah dipahami untuk yang memiliki kemampuan dalam bermain gadget seperti kalangan anak muda, akan tetapi ini sulit dipahami untuk orang tua yang awam, karena sosialisasi program sipkumham ini di kalangan masyarakat hanya dikasih modul atau sebuah link dari internet untuk tata cara menggunakan sipkumham

Capacity (Kapasitas)	Ketersediaan Sumber Daya Financial	Menurut saudara apakah dipungut biaya ketika melaporkan permasalahan melalui program SIPKUMHAM ?	Yang saya tahu dan yang saya rasakan saat ini dalam mengakses atau melaporkan dalam program ini tidak dipungut biaya apapun
	Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Menurut saudara apakah dapat mudah mengakses dalam pelaporan pada program SIPKUMHAM?	Selama yang saya rasakan dalam mengakses program ini sudah cukup mudah dalam mengakses akan tetapi jika kita belum daftar kita harus menunggu 1x24 jam untuk di acc dari pusatnya bahwa kita membuat akun dan baru bisa login
	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi dan Keahlian	Menurut saudara, apakah aplikasi SIPKUMHAM dapat memberikan data dan informasi berita yang akurat dan jelas?	yang saya baca dari internet berita berita yang di keluarkan dari SIPKUMHAM itu sangat akurat dan jelas yah, karena berita ini dari program program yang sudah valid dan ternama. Jadi menurut saya cukup akurat dan jelas
Value (Manfaat)	1	Menurut saudara, apakah keberadaan aplikasi SIPKUMHAM dapat mengatasi permasalahan yang dilaporkan melalui aplikasi tersebut ?	menurut saya untuk dapat mengatasi permasalahan belum efektif ya, karena butuh waktu yang sangat lama proses yang lama mungkin ya, yang saya rasakan dari saya melaporkan masalah belum juga dapat respon

Lampiran 3

1. Proses wawancara dengan Koordinator Publikasi Pengembangan SIPKUMHAM



2. Proses wawancara dengan Staff Pengelola Program SIPKUMHAM



3. Proses wawancara dengan Staff Analis Kebijakan SIPKUMHAM



4. Proses wawancara dengan Pengguna SIPKUMHAM Kanwil Jaksel



5. Proses wawancara dengan Pengguna SIPKUMHAM sebagai Masyarakat



Lampiran 4

Surat balasan penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2525015 Faksimile : 021-2526438
Laman : <http://www.balitbangham.go.id>

SURAT KETERANGAN
NOMOR: PPH.1-UM.01.01-299

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jonny P. Simamora, S.I.P., M.Si.
NIP : 197312251993031001
Pangkat/Gol. ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Cindy Shafira
NIM : 193515516020
Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik

telah melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Penerapan E-Government Melalui Program SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia)" di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 1 Juni s.d. 20 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2023
Sekretaris,


Jonny P. Simamora, S.I.P., M.Si.
NIP 197312251993031001



Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Informasi Elektronik (BPSI) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk verifikasi dapat di akses melalui tautan <https://bsn.go.id/verifikasi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cindy Shafira

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Telp : 089657509765

Alamat : Gg. H. Maid, Jl. Talas II Rt06/01 No.92. Kel. Pondok
Cabe Iir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
BANTEN

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pondok Cabe Iir 02 : 2007-2013
2. SMP Dharma Karya UT : 2014-2016
3. SMK Nusantara 01 Akuntansi Ciputat : 2017-2019
4. Universitas Nasional : 2019-2023

SKRIPSI_CINDY SHAFIRA_193515516020

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	journal.unesa.ac.id Internet Source	1%
2	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	<1%
5	medan.tribunnews.com Internet Source	<1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
8	komunitas-atlas.blogspot.com Internet Source	<1%
9	docplayer.info Internet Source	<1%